

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra. *Pemidanaan*. USU Press, Medan, 2011.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ayu Efritadewi. *Modul Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 2. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan 1. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jonathan Herring. *Criminal Law: Text, Cases, And Materials*. Oxford University Press, New York, 2006.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- M. Cherif Bassiouni. *Substantive Criminal Law*. C. Thomas Publicher, USA, 1978.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2002.

_____. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2006.

Mohammad Ekaputra. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*. USU Press, Medan, 2014.

Muhammad Taufik Makaroa dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

P.A.F. Lamintang. *Hukum Panitensier Indonesia*. Armico, Bandung, 1988.

Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1981.

_____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2015.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung, 1969.

B. Jurnal

A A Made Yuda Dwi Hendrata, A A Sagung Laksmi Dewi dan I Nengah Laba. "Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn Mtr)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1448>.

Ayu Veronica, Kabib Nawawi dan Erwin. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*. Vol. 1 No. 3, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>.

Bella Verawaty Arnas, Remon Supusepa dan Margie Gladies Sopacua. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Ambon Terhadap Perampasan Jenazah Covid-19 dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 7, 2021. Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/661/408>.

- Lestiyana dan Elly Sudarti. "Putusan tentang Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*. Vol. 1 No. 1, 2020. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8372/9900>.
- M. Hamdan. "Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan tentang Pembaruan KUHAP)". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 40 No. 4, 2010. Diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/234>.
- Robi Amu. "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Legalitas*. Vol. 5 No. 1, 2012. Diakses dari <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/879>.
- Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*. Vol. 1 No. 1, 2022. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>.
- Tommy Dwi Putra. "Penerapan Hukum Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 2 No. 2, 2013. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1537>.
- Totok Sugiarto. "Kajian Hukum Pidana Militer di Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Ius*. Vol. 9 No. 1, 2021. Diakses dari <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/764>.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara. LNRI Tahun 1934 Nomor 167.
- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LNRI Tahun 1981 Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
- _____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. LNRI Tahun 1997 Nomor 84. TLNRI Nomor 3713.
- _____. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. LNRI Tahun 2004 Nomor 127. TLNRI Nomor 4439.
- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LNRI Tahun 2009 Nomor 157. TLNRI Nomor 5076.

_____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. LNRI Tahun 2014 Nomor 257. TLNRI Nomor 5591.

D. Internet

Lawyers Clubs. “Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan”. Diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/#:~:text=Teori%20relatif%20ini%20melihat%20bahwa,tidak%20akan%20melakukan%20kejahatan%20lagi>, pada tanggal 24 April 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim”. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU-PA>, pada tanggal 11 Februari 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pulang Pisau. “Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan”. Diakses dari <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan#:~:text=%E2%80%9Cpengadilan%20adalah%20badan%20atau%20instansi,acara%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia>, pada tanggal 11 Februari 2022.